

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Teori Penelitian

##### 1. Pengertian Masjid

Kata masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sajudun*, yang berarti sujud menundukkan kepala patuh dan taat dengan penuh hormat dan takzim. Dari kata *sajada* kemudian terbentuk kata masjid (jamak: *masajid*) yang artinya tempat sujud, Pengertian tempat sujud tidak mengacu pada bangunannya beratap atau tidak, berbatas atau tidak yang penting adalah tempat sujud. Ada juga yang menghubungkan kata *sajada* itu dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT.

Namun dalam faktanya, masjid tidak hanya tempat bersujud, tetapi tempat umat muslim melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan lainnya seperti, pendidikan, dakwah, budaya islami dan lainnya. Pada bangunan masjid tertentu selain ruang utama yang berfungsi sebagai tempat shalat, terdapat juga ruang aula, kantor pimpinan badan kemakmuran masjid (BKM), perpustakaan, bahkan ruang kuliah. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ar Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Afan dan Ali bin Abi Thalib) masjid berfungsi sebagai tempat mengendalikan pemerintahan Negara termasuk menyusun strategi perang.

Di dalam Al-Qur'an istilah masjid ditemukan 19 kali, sedangkan istilah *ssjud*, *sajada* dan berbagai bentuknya ditemukan 92 kali. Kalau dikaitkan dengan pengertian diatas, masjid adalah sesuatu yang sangat universal. Al-Qur'an maupun sumber ajaran islam lainnya seperti hadis dan sunnah tidak menjelaskan secara konkret bentuk bangunan masjid, dengan kata lain tidak ada landasan dan aturan yang ditetapkan oleh islam tentang bangunan masjid yang menjadi syarat utama dalam arah hadap masjid atau kiblat shalat, yaitu ka'bah di Kota Makkah. Pada bangunan masjid, arah ka'bah dilambangkan

atau ditandai dengan mihrab, yaitu ruangan kecil tempat imam memimpin shalat berjamaah.

Dalam perkembangannya pengertian masjid kemudian menjadi lebih spesifik, yaitu sebuah bangunan atau gedung atau lingkungan yang ditembok dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik shalat lima waktu, shalat juma'at, ataupun shalat hari raya. Pengertian masjid sebagai suatu bangunan merupakan wujud atau aspek fisik dari kebudayaan islam.

Di Indonesia kata masjid dilafalkan berbeda-beda, seperti *mesigit* (Aceh) dan *mesigi* (Jawa Barat), dan mesigi (Sulawesi Selatan). Tidak hanya itu, ada penamaan tersendiri untuk bangunan masjid atau bangunan tempat shalat yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak dipakai untuk shalat Jum'at, yaitu Mushala dengan berbagai nama atau sebutan seperti *meunasah* (Aceh), *Surau* (Minang), *Langgar* (Jawa), *tajung* (Sunda), *suro/mandersa* (Batak), dan *Santren* (Lombok). Dalam Khazanah kebudayaan Islam dikenal istilah *mashad* (masjid-makam), yaitu masjid yang dibangun di kompleks makam; dan masjid-madrasah (masjid pesantren), yaitu masjid yang dibangun di kompleks pesantren. Di Iran dan India dikenal *idghah*, bahasa Persia untuk menyebut musala atau tempat salat terbuka, biasanya dipergunakan untuk shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Meskipun bentuk konkret bangunan masjid tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis, terdapat perintah untuk membangun masjid sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran Ahmad dan Tirmizi yang artinya: Rasulullah menyuruh kepada kita agar membangun masjid di rumah kita dan ia memerintahkan agar kita selalu membersihkannya. Selain itu, agama islam mengajarkan bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendir. Menurut sebuah hadis, pahala shalat berjamaah 27 derajat (27 kali lipat) dibanding shalat sendirian. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut dirasa perlu mendirikan bangunan, di dalamnya Jemaah melakukan shalat berjamaah, terbebas dari gangguan alam

(panas dan hujan) dan lingkungan sekitarnya yang dapat mengurangi kekhayukkan shalat. Bangunan inilah yang kemudian kita sebut sebagai masjid.<sup>1</sup>

Peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah ada dalam sejarah dan tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat, yaitu dengan dibentuknya *baitul mal*.

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan umat muslim, Peran masjid dengan baitul malnya sebagaimana dicontohkan para sahabat Rasulullah dalam mengelola zakat, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola dana berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat sehingga dapat meretas masalah pengangguran dan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah Muhammad SAW pun telah mencontohkan dalam membina dan mengelola keperluan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, pendidikan, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya melalui masjid. Kuncinya pada pengelolaan masjidnya ( *takmir*). Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi islam, pusat pengkajian dan penyelesaian problematika umat dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Masih banyak fungsi masjid yang lain. Namun yang jelas pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan oleh beliau sebagai pusat peradaban. Pusat sumber inspirasi dalam mengembangkan syiar dan kemajuan ideologinya. Rasulullah SAW berhasil membina masyarakatnya meskipun komposisi struktur masyarakatnya yang ada ternyata masyarakat dengan multi ras, multi etnis dan multi agama. Akhirnya, masyarakat bentukan Rasulullah menjadi masyarakat yang disegani dan dikagumi baik lawan maupun kawan dan menjadi pemimpin di dunia pada masanya.

Upaya agar lembaga masjid dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Yakni sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka

---

<sup>1</sup> Kartum Setiawan. *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta* (Jakarta: Erlangga: 2011), h. 10

meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Lebih spesifik dapat dikatakan: Hal-hal apa dan bagaimana kita membuat masjid, jamaah system, sumber dana, dan penggunaannya, dan kegiatannya sehingga masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan umat yang dapat menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang baik, sejahtera, rukun, damai, dalam siraman rahmat Allah SWT.

## **2. Struktur Dan Bagan Organisasi Masjid**

Ketua dan pengurus bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program atau rencana kerja. Baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus. Di dalam kegiatan rutin itu, misalkan saja, tercakup apa-apa saja yang dapat dilakukan didalam masjid. Kegiatan pemugaran dan perbaikan bangunan, misalnya tergolong dalam program khusus.

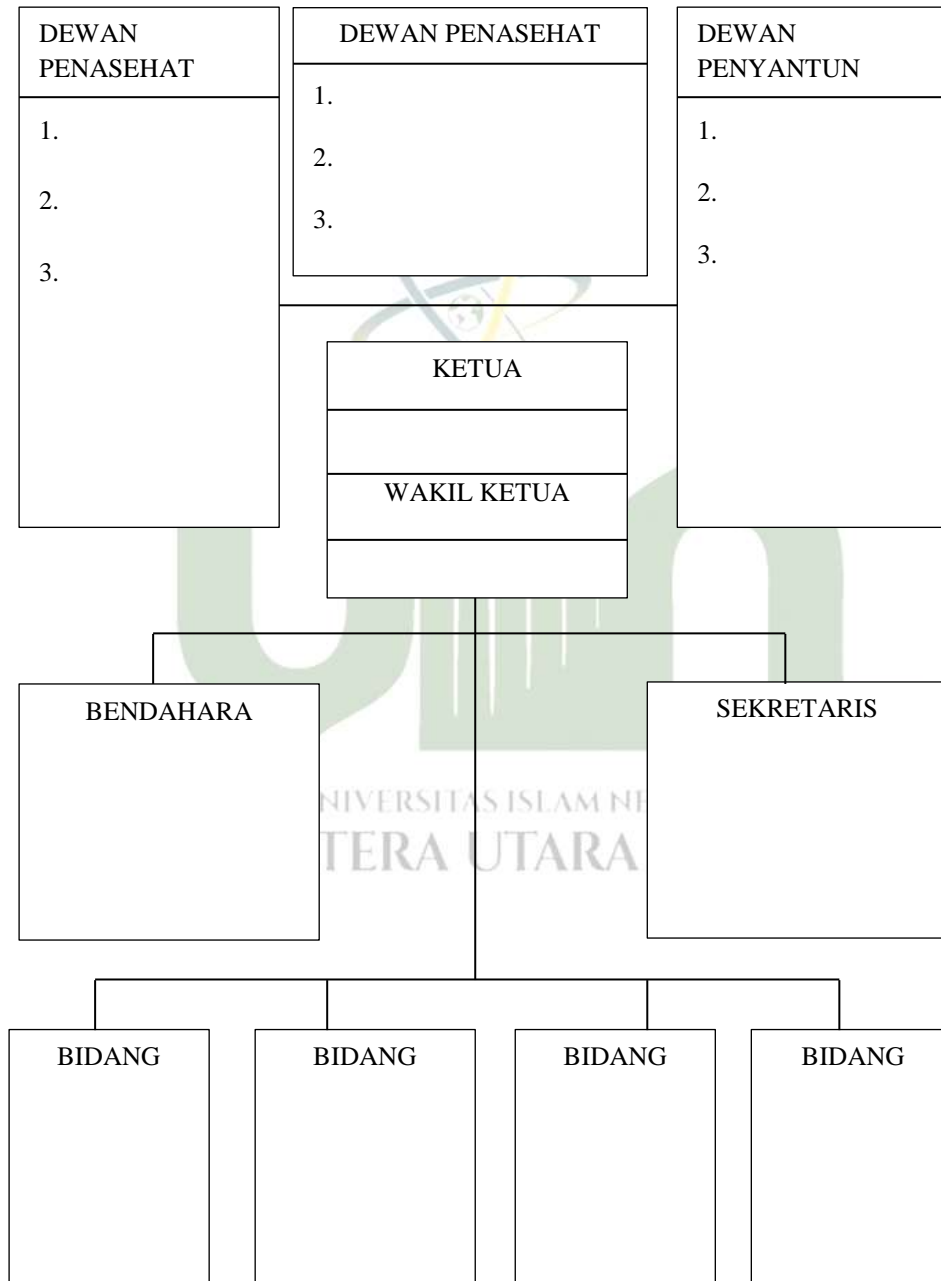
### **a. Struktur Organisasi Masjid**

Struktur organisasi masjid adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit; adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi kegiatan yang berbeda-beda tersebut; dan adanya wewenang, garis pembrian tugas, dan laporan.

### **b. Bagan Organisasi masjid**

Struktur organisasi pada umumnya dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut dengan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi, yang didalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan/fungsi tertentu sebagai garis penegas wewenang atau hierarki.

Contoh Struktur dan Bagan Organisasi Masjid.



Gambar 2. 1. Contoh Struktur dan Bagan Organisasi Masjid

c. Pembagian Tugas Para Anggota Prngurus Masjid

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing.
- b. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam
- c. Melaksanakan program dan mengamalkan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Menandatangani surat-surat penting, termasuk surat atau nota pengeluaran uang/dana/harta kekayaan organisasi
- e. Mengatasi segala permasalahan atas tugas yang dijalankan oleh pengurus masjid
- f. Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus; dan
- g. Mengelompokkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada jamaah

2. Sekretaris

- a. Mewakili ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada ditempat
- b. Memberikan pelayanan teknis administrative
- c. Mebuat dan mendistribusikan undangan
- d. Membuat daftar hadir rapat/pertemuan
- e. Mencatat dan menyusun notulen rapat/pertemuan
- f. Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretaris, yang mencakup
  1. Membuat surat menyurat dan pengarsipannya
  2. Memelihara daftar jamaah/guru ngaji/majelis taklim
  3. Membuat aporan organisasi (bulanan, triwulan, dan tahunan)
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tuhas-tugasnya kepada ketua

### 3. Bendahara

- a. Memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berupa uang, barang-barang investasi, maupun tagihan
- b. Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana masjid serta mengendalikan pelaksanaan Rencana Anggaran Belanja Masjid sesuai dengan ketentuan yang ada
- c. Menerima, menyimpan dan membukukan keuangan, barang, tagihan dan surat-surat berharga
- d. Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua
- e. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang
- f. Membuat laporan keuangan rutin atau pembangunan (bulanan, triwulan, tahunan) atau laporan khusus; dan
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua

### 4. Seksi Pendidikan dan Dakwah

- a. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan dakwah yang meliputi:
  1. Peringatan hari besar Islam, kegiatan majelis taklim dan pengajian-pengajian
  2. Jadwal imam dan khatib Juma'at
  3. Jadwal muazin dan bilal Jum'at
  4. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha
- b. Mengkoordinir kegiatan shalat Jum'at
  1. Mengumumkan petugas khatib, imam, muazin dan bilal Jum'at
  2. Mengumumkan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan univ kerja intern dan ekstern
  3. Mengendalikan kegiatan remaja masjid, ibu-ibu, dan anak-anak
  4. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua

5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua

5. Seksi pembangunan dan Pemeliharaan

- a. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan masjid yang meliputi
  1. Membuat program pembangunan masjid dan rehabilitasinya
  2. Membuat rencana anggaran pembangunannya dan gambaran bangunannya
  3. Melaksanakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sesuai dengan program
- b. Mengatur kebersihan, keindahan dan kenyamanan di dalam dan di luar masjid
- c. Memelihara sarana dan prasarana masjid
- d. Mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid dan mengusulkan perbaikannya atau penggantinya
- e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua

6. Seksi peralatan dan Perlengkapan

- a. Merencanakan, mengatur, dan menyimpan peralatan yang meliputi:
  1. Menginventarisakan harta kakayan masjid
  2. Menyiapkan pengadaan peralatan untuk kelancaran kegiatan masjid
  3. Mendata barang-barang yang rusak atau yang hilang dan menyusun rencana pengadaan atau pengganti
  4. Mengatur dan melengkapi saran dan prasarana perpustakaan masjid
- b. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua



## 7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan

a. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi:

1. Santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan orang terlantar
2. Khitanan massal
3. Pernikahan
4. Kematian
5. Qurban/akikah

b. Melakukan koordinasi dengan pengurus RT/RW dan pemuka agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya

c. Melaksanakan kegiatan khusus yang diberikan oleh ketua

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua

## 8. Pembantu UMUM

Membantu secara umum kelancaran kegiatan pengurus masjid yang meliputi:

- a. Penyampaian undangan
- b. Mengumpulkan infak/sedekah/amal jamriah/zakat
- c. Mengajak warga masyarakat memakmurkan masjid
- d. Kegiatan-kegiatan lain (seperti penyuluhan dari pemerintah)<sup>2</sup>

### 3. Masjid Dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45

Masjid sebagai lembaga keagamaan islam merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented*). Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan system pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan. Termasuk aktivitas peratan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (*takmir*)

---

<sup>2</sup> Moh.E.Ayub.el.et. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 44

juga memerlukan system pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid, dan 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid.

Akan tetapi, ilmu dan praktik akuntansi dalam lembaga keagamaan seperti masjid masih kurang jadi perhatian. Ilmu akuntansi dan praktiknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan khususnya masjid sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya, seperti dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat, maka lembaga keagamaan menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berbeda dengan entitas politik lainnya, lembaga keagamaan merupakan entitas publik dan juga merupakan organisasi nirlaba yang berbeda dengan organisasi lainnya semana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Dengan tercantumnya organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 menegaskan, bahwa praktik akuntansi ini ada dalam organisasi nirlaba khususnya lembaga keagamaan. Dimana lembaga keagamaan ini merupakan organisasi nirlaba yang beraskan landasan pondasi prinsip agama yang dikembangkan, namun prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak sesuai dengan prinsip materialisme dan keduniawian.

Dikarenakan anggapan tersebut, praktik akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau organisasi nirlaba menjadi tidak biasa. Walaupun tidak biasa atau umum, penelitian praktuik akuntansi pada lembaga keagamaan yang dipenuhi oleh landasan prinsip agama tentu saja sebagai

kegiatannya juga harus terhindar dari dosa atau hal-hal yang dilarang agama, sehingga penerapan akuntansi yang ada harus steril dari larangan Tuhan.

Sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelolaan dananya bahkan tidak tahu menahu bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang ada. Padahal bahwa praktik akuntansi merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas, dimana transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan seluruh program di masjid. Disamping itu transparansi dan akuntabilitas dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan warga masjid melalui penyediaan informasi.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu factor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggungjawab para pengurus masjid (*takmir*) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

#### **4. Hubungan Masjid Dengan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang public masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi. Termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang public dalam hal ini yaitu masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama ini dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan

pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari pemberi/donatur kepada pengelola dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid, dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada rencana/gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Setiap masjid tentu memiliki aktivitas yang berbeda tergantung sumber daya. Karakter masing-masing masjid dan permasalahannya. Seperti yang diketahui masjid tidak hanya berdiri di pusat kota atau dilingkungan warga sekitar sebagai sarana peribadatan tetapi sekarang masjid telah berdiri megah di lingkungan perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi memiliki masjid sebagai sarana peribadatan mahasiswa, dosen, warga kampus lainnya serta masyarakat sekitar masjid kampus berdiri. Selain itu, masjid sendiri telah menjadi penunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa di bidang keagamaan, dan juga sama halnya dengan masjid besar, beberapa masjid kampus telah memiliki wadah penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dari masyarakat sekitar. Meskipun hanya masjid kampus, pengelolaan keuangan di setiap organisasi maupun perusahaan, baik kecil atau besar pasti didalamnya terdapat pengelolaan keuangan yang hampir

semuanya dituntut untuk transparan dan akuntabel. Sama halnya dengan masjid yang berada di lingkungan masyarakat, masjid kampus juga di dalamnya terdapat aktivitas pemasukan dan pengeluaran dana dari berbagai sumber.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta atau dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus. Harta zakat didayagunakan atau dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.<sup>3</sup>

## 5. Pengertian Akuntansi

Ada beberapa definisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Salah satunya adalah pengertian dan yang dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan”.

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat diketahui atau dikenal bahwa:

1. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif.

---

<sup>3</sup> Raihan, M., & Kamilah, K. (2021). *Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 19

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.
3. Cabang-cabang akuntansi cukup banyak , salah satunya adalah akuntansi pemerintahan.

Yang perlu diketahui dari defenisi diatas adalah “entitas” ekonomi. Entitas adalah “satuan” yang dapat berarti satuan organisasi, misalnya organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan, dan lain-lainnya. Akuntansi yang berkaitan dengan prganisasi perusahaan (bisnis) dikenal dengan akuntansi sector privat, dan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah merupakan suatu satuan organisasi yang non-profit maka dapat dipahami akan adanya akuntansi untuk pemerintahan daerah, dan akan termasuk dalam kelompok akuntansi sektor publik.<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 143.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Secara umum akuntansi merupakan suatu system informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi

keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Dari definisi tersebut ada beberapa istilah pokok yang terlalu diperhatikan:

1. Seragam melalui prosedur atau urutan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu aturan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk menangani transaksi yang berulang-ulang.
2. Identifikasi. Melalui proses akuntansi kejadian-kejadian ekonomi dikenali karakteristiknya dan dikenali pengaruhnya terhadap kekayaan, utang, dan modal, serta pendapatan dan biaya.
3. Mencatat atau merekam. Berdasarkan hasil identifikasi atas peristiwa ekonomi yang sudah terjadi selanjutnya dilakukan pencatatan untuk merekam transaksi tersebut dalam system yang sudah disediakan.
4. Menafsirkan. Jika transaksi ekonomi sudah dicatat, dan sudah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan, maka secara sistematis akumulasi atau kumpulan tiap kelompok transaksi dapat memberikan makna untuk ditafsirkan.
5. Komunikasi. Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan rincian dan jumlah kekayaan, utang, modal pada akhir periode, akuntansi. Selain itu, proses akuntansi juga menghasilkan laporan keuangan tentang jumlah pendapatan, biaya dan laba selama satu periode akuntansi.
6. Peristiwa ekonomi. Yang dimaksud adalah setiap kejadian yang mempengaruhi kekayaan, utang, modal, pendapatan, atau biaya perusahaan, dalam ilmu akuntansi peristiwa ekonomi ini sering dikenal dengan istilah transaksi.
7. Organisasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan, organisasi pemerintah, organisasi sosial, dan organisasi lain yang sehari-harinya mengelola keuangan. Namun, selain organisasi formal, individu perorangan dapat saja mengorganisasi kegiatannya



dan kemudian menyelenggarakan akuntansi untuk mengomunikasikan informasi keuangannya dengan pihak lain.<sup>5</sup>

Akuntansi dapat didefinisikan berdasarkan dua aspek penting.

1. Penekanan pada aspek fungsi, yaitu pada penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan aspek fungsi akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyajikan informasi yang penting untuk melakukan suatu tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas dari organisasi. Informasi tersebut penting untuk perencanaan yang efektif, pengawasan dan pembuatan keputusan oleh manajemen serta memberikan pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditor, pemerintah, dan lainnya.
2. Penekanan pada aspek aktivitas dari orang yang melaksanakan proses akuntansi, dalam aspek ini, orang yang melaksanakan proses akuntansi harus:
  - a. Mengidentifikasi data yang relevan dalam pembuatan keputusan.
  - b. Memproses atau menganalisa data relevan
  - c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Oleh karena itu, akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengelolaan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

Setiap organisasi/lembaga pasti memiliki bagian administrasi yang pengelolaannya akan terhubung dengan arsip. Salah satu sumber datanya adalah dokumen/arsip, karena setiap institusi pasti membutuhkan data dan informasi. Maka, pengelolaan arsip perlu diterapkan dengan baik dengan tujuan untuk membantu tugas lembaga dalam pencapaian tujuan. Jika kearsipan suatu lembaga tidak tertata rapi, maka pegawai atau karyawan lembaga kesulitan menemukan dokumen yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat dan pada akhirnya

---

<sup>5</sup> Samryn, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.3.

mengganggu proses dan aktivitas kerja kantor dalam mencari arsip. Fungsi arsip sebagai ingatan, pusat informasi, sumber sejarah perlu dikelola dengan baik agar dapat memperlancar seluruh kegiatan dan proses pekerjaan kantor yang berhasil dan berdaya guna.<sup>6</sup>

Pengertian akuntansi juga dapat dilakukan dengan memperhatikan sudut pandang pemakai jasa akuntansi, yaitu bahwa akuntansi adalah “Suatu disiplin yang menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

- a. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen,
- b. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya.

Akuntansi secara teknis diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. AICPA (*American Institute of Certified Public Accounting*) mengartikan akuntansi sebagai suatu seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya.<sup>7</sup>

## **6. Prinsip Akuntansi**

### **a. Pengertian Prinsip Akuntansi**

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta, menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur

---

<sup>6</sup> Faradilla, P., & Kamilah, K. (2021). *Pentingnya Penataan Arsip dalam Menunjang Aktivitas Kerja Karyawan pada Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8301

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi dasar* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010), h.18

akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan, ada beberapa pihak yang memberikan pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi.<sup>8</sup>

Jika manajemen suatu perusahaan dapat mencatat dan melaporkan keuangan yang dirasa sesuai untuk mereka, maka perbandingan laporan keuangan antar perusahaan akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *generally accepted accounting principles (GAAP)*. Sebagai buku akuntansi menggunakan istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum, prinsip akuntansi yang diterima umum-umum atau prinsip akuntansi lazim. PABU memungkinkan investor dan para pemangku kepentingan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan.<sup>9</sup>

Profesi akuntansi telah menciptakan seperangkat standard an aturan yang diakui secara umum sebagai pedoman dalam pelaporan akuntansi, yang dinamakan prinsip akuntansi yang berterima secara umum (*general accepted accounting principles, GAAP*)<sup>10</sup>

## **b. Penggolongan Prinsip Akuntansi**

Menurut Syaiful Bahri di dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK, ETAP, IFRS*” terdapat beberapa prinsip-prinsip akuntansi sebagai berikut:

1. Komunitas usaha (*going concern*) adalah kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi dimasa yang akan datang

---

<sup>8</sup> Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011) h.104

<sup>9</sup> Jammes, M. reeve, et, al. *pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), h.13

<sup>10</sup> Wibowo, (ed.) *Pengantar Akuntansi II*, (Palmerah Selata: PT Grasindo, 2004), h.20.

2. Kesatuan usaha (*business entity*). Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya
3. Periode akuntansi (*Accounting periode*), adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan.
4. Kesatuan pengukuran (*measurent unit*). Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari Negara tempat perusahaan berdiri)
5. Bukti yang objektif (*ojektif evidence*) informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada
6. Pengungkapan sepenuhnya (*full disclousure*). Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai
7. Konsistensi (*consistency*) Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu period eke periode yang lain agar laporan leuangan dapat diperbandingkan
8. Realisasi (*matching expense with revenue*). Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban perode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba rugi period berjalan.<sup>11</sup>

## **7. Akuntabilitas**

### **a. Sekilas Tentang Akuntabilitas**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>11</sup> Syaiful bahri, *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, Penerbit ANDI: (Yogyakarta 2016, hal.3

mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu dana atau uang yang dikelola oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah di era reformasi termasuk reformasi keuangan daerah yang merupakan era yang lebih demokratis dan terbuka kepada rakyat menjadi relatif lebih besar, maka masyarakat lebih tertatik dan merasa ikut mengawasi berjalannya system akuntabilitas.<sup>12</sup>

#### **b. Akuntabilitas Pada Organisasi Keagamaan**

Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, dimana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dara para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk.<sup>13</sup>

#### **c. Karakteristik Dan Lingkungan Organisasi Keagamaan**

Karakteristik organisasi keagamaan dapat dikupas melalui arti “organisasi keagamaan” secara etimologi, “organisasi keagamaan” dapat diartikan sebagai organisasi yang focus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. “Organisasi keagamaan” dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah Masjid, Mushola, Gereja, Kuil, Klenteng, Wihara, maupun Pura atau

---

<sup>12</sup> Abdul Halim, *Aakuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 146.

<sup>13</sup> *Ibid*,h.219

organisasi diluar organisasi keagamaan namun bergerak dalam bidang keagamaan. Dari segi Penyelenggaraannya , organisasi keagamaan dijadikan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi misi agama tersebut.

Benarkah ilmu akuntansi ada dalam islam ? Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Kristen, Katolik, Budha, Hindu ? Pertanyaan ini begitu menggelitik karena agama sebagaimana dipahami oleh banyak kalangan hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas dan prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi tidak masuk dalam cakupan agama. Anggapan terhdap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan pada syariah Islam) atau akuntansi Kristen atau akuntansi Hindu dan lainnya wajar saja dipertanyakan.

Jika seorang mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam, Misalnya, dalam Al-Quran, maka dalam ayat-ayat maupun hadist-hadist, islam juga membahas ilmu akuntansi.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam tataran makro maupun mikro. Ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit” perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya, yaitu “membumikan” ajaran langit. Din dunia , agama harus dicari relevansinya sehingga dapaet mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial ekonomi umat. Dengan demikian agama tidak selalu berada dalam tatanan normatif saja. Islam dan agama lainnya merupakan agama amal, sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual.

Ekisistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual bel, utang-piutang dan sewa-menyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam

agama, system pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Melihat dari apa yang timbul pada organisasi keagamaan, organisasi pada lembaga peribadatan dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba. Hal ini disebabkan oleh gerak dan orientasi organisasi pada organisasi keagamaan seirama dengan organisasi yang berjenis nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa para meter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah sumbangan dana yang diperoleh pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikannya.<sup>14</sup>

Seperti organisasi atau lembaga public lainnya, organisasi keagamaan juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya soisal, serta dampak negative dari aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut telah menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi dilingkup organisasi keagamaan. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk lengkap maupun secara sederhana sekalipun.

Akuntansi yang diterapkan pada organisasi keagamaan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik yang dimaksud adalah para anggota, umat, atau pengikut agama di organisasi keagamaan bersangkutan.

---

<sup>14</sup> Bastian Indra, *Auntansi untuk LSM dan Partai Politik* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 216

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi keagamaan yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yang profit-oriented dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian dan anggarannya.

Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai. Dilihat dari tujuannya, organisasi keagamaan tidak bertujuan memperoleh laba, tidak seperti organisasi swasta yang *profit-oriented*. Tujuan organisasi keagamaan adalah memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang membutuhkan maupun yang telah menjadi ritual dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada umat, namun tidak berarti organisasi keagamaan sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini tergantung pula pada kondisi umat yang dilayani. Misalnya, apabila terjadi perkembangan umat secara kuantitas, maka kebutuhan akan daya dukung untuk pelayanan itupun otomatis turut berkembang. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan layanan. Tujuan keuangan organisasi keagamaan ini berbeda secara filosofis, konseptual, dan operasional dengan organisasi profit swasta.

Dari segi sumber pendanaan atau lebih konkretnya struktur modal dan struktur pembiayaan, organisasi keagamaan sangat berbeda dalam hal bentuk dan jenisnya. Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama.

Adapun dalam konteks pola pertanggungjawaban, jika organisasi sector swasta bertanggungjawab kepada pemilik usaha dan kreditor, maka pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting



dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya dapat berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah.

Secara kelembagaan, organisasi keagamaan juga berbeda dengan organisasi lainnya, termasuk organisasi public. Struktur organisasi ini tidak perlu terlalu formal, namun biasanya ada seseorang tokoh ataupun pihak yang disegani. Pihak yang berpengaruh ini biasanya kemungkinan besar akan mengarahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakan akan sangat berpengaruh dalam memilih struktur organisasi.<sup>15</sup>

Apabila dilihat dari karakteristiknya, anggaran organisasi keagamaan sangat bersifat terbuka bahkan umat dapat melihat sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini terjadi karena anggaran berasal dari umat dan perkembangan organisasi keagamaan tersebut, pada umumnya, merupakan tanggung jawab umat secara kolektif.

## **8. Laporan Keuangan Masjid**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Suatu lembaga/organisasi/perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan mencatat transaksi keuangan secara sistematis. Pencatatan yang dilakukan akan diringkas menjadi suatu laporan keuangan. Laporan ini dapat dibuat setiap saat, di mana pihak-pihak yang terkait menginginkannya, dapat dibuat dalam bulanan, triwulan, semesteran dan satu tahun atau satu periode akuntansi sesuai dengan kebijakan perusahaan.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan pengembangan dibutuhkan adanya program monitoring dan evaluasi dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 217.

<sup>16</sup> Mursyidi, *Akuntansi dasar* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), h. 121

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan monitoring dan evaluasi, maka dipandang perlu adanya satu pedoman yang menjadi panduan atau acuan bagi semua masjid dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan. Untuk menjalankan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan masjid maka diperlukan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi.

Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang – ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu.

Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan tulis tangan seperti yang dijumpai pada masjid-masjid kecil, dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin otomatis seperti dijumpai pada masjid-masjid besar. Perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin-mesin pembukuan computer untuk mengelola data akuntansi semakin banyak digunakan baik dalam masjid besar maupun menengah.

Metode pencatatan akuntansi mana yang akan digunakan dalam suatu organisasi, apakah metode tulis tangan, mekanik, atau elektronik tergantung pada berbagai faktor. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan antara lain besarnya organisasi, jumlah data yang harus diproses, dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian setiap metode tersebut. Masjid kecil mungkin akan menganggap biaya pemakaian computer elektronik terlalu mahal, sebaliknya dalam masjid besar penggunaan metode tulis tangan dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan sangat banyak jumlahnya. Namun

demikian tanpa memandang metode pencatatan akuntansi mana yang digunakan, semua metode tersebut sama-sama membutuhkan adanya konsep-konsep dasar akuntansi.<sup>17</sup>

## **9. Komponen Laporan Keuangan Masjid**

Komponen laporan keuangan pada umumnya memiliki perbedaan dengan laporan keuangan yang berlaku pada masjid. Komponen laporan keuangan pada masjid terdiri dari empat, yaitu:

### **a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Neraca adalah laporan keuangan yang menggunakan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa asset, kewajiban dan net asset pemilik suatu masjid pada tanggal tertentu.

### **b. Laporan Operasional**

Laporan operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung.

### **c. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu masjid selama periode tertentu.

### **d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mhd. Syahman Sitompul, et al, *Akuntansi Masjid* (Febi UIN-SU Press. 2015), h.63

<sup>18</sup> *Ibid*, h.68.

## 10. Unsur- Unsur Laporan Keuangan Masjid

Sama halnya dengan laporan keuangan akuntansi umum, laporan keuangan masjid memiliki 5 (lima) unsur laporan keuangan, yaitu:

### a. Aset

Aset yaitu sumber daya dikuasai sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari keuntungan ekonomi di masa depan diharapkan mengalir pada entitas.

Aset terdiri dari 2 sub-bagian, yaitu aset lancar (seperti kas, persediaan, dll) dan aset tetap (seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dll). Pada aset tetap, terdiri:

#### a. Aset tetap tidak terikat

Aset tetap tidak terikat yaitu aset yang nilai manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun

#### b. Aset tetap terikat

1. Aset tetap terikat sementara, yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas dalam jangka waktu yang disepakati, dan akan dikembalikan saat jatuh tempo.
2. Aset tetap terikat permanen, yaitu aset yang diberikan oleh pihak ketiga untuk dipergunakan oleh entitas secara permanen.

Karakteristik aset tetap adalah:

1. Aset diperoleh untuk digunakan kembali dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali.
2. Aset tersebut berjangka panjang dan dapat mengalami depresiasi atau penyusutan.
3. Aset memiliki substansi fisik atau bisa dikatakan memiliki wujud.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ramadhani, A. P., & Kamilah, K. (2021). *Analisis Penggunaan Aset Tetap Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8220-8221

## **b. Kewajiban**

Kewajiban yaitu kewajiban masalalu yang dijadikan kewajiban masa sekarang dengan menyerahkan sejumlah sumber daya/jasa.

## **c. Net asset (Ekuitas)**

Net Aset atau yang disebut ekuitas merrupakan sisa ha katas asset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

## **d. Pendapatan**

Pendapatan merupakan meningkatkan manfaat ekonomi selama I (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekatkan dari suatu asset dan meningkatkan nilai net asset yang menjadi partisipasi hak.

### **a. Jenis-Jenis Pendapatan**

Masjid merupakan wadah yang bertindak sebagai subjek dan objek hukum. Oleh karena itu, masjid harus mempunyai pendapatan agar dapat membiayai kegiatan operasional dan kelangsungan hidupnya. Masjid sebagai entitas public tempat kegiatan beribadah umat islam, yang menjadi sumber pendapatannya adalah partisipasi dan sumbangan masyarakat serta kelebihan dana dari kegiatan yang diadakan pengurus masjid. Lazimnya pendapatan entitas masjid berasal dari pendapatan zakat, pendapatan infaq, pendapatan sodaqah, dan pendapatan wakaf.

#### **1. Pendapatan Zakat**

Zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak.

Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta dan penyaluran zakat yang tidak keluar dari asnaf. Dimana penyalurannya dapat diprioritaskan sesuai dengan realitas keberadaan mustahik.

## 2. Pendapatan Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Infaq tidak mengenal nisaf, boleh diberikan kepada siapapun.

Pendapatan infaq adalah pendapatan masjid atas jasa yang diberikan masjid. Pendapatan infaq bersumber dari penyewaan aula masjid, ambulance dan parker. Pinjaman qard bagi masyarakat dan pendapatan lain atas kegiatan usaha masjid.

## 3. Pendapatan Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shadaqoh yang berarti benar. Menurut terminology syariat, shadaqah berarti menetapkan/menerapkan sesuatu, sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat baik dari segi jumlah, waktu dan kadarnya.

Pendapatan shodaqah bersumber dari pemberian jamaah dan masyarakat lewat kotak amal, sumbangan rutin.

## 4. Pendapatan wakaf

Wakaf berasal dari kata wafqu berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologi syariah, wakaf berarti menahan, mengekang atau menghentikan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah untuk

memindahkan milik pribadi menjadi suatu badan atau yayasan yang membrikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendpatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.

Pendapatan wakaf bersumber dari wakaf berupa asset tetap seperti gedung, tanah, kendaraan. Maupun wakaf tidak tetap berupa wakaf produktif, wakaf uang.

Untuk mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan zakat perlu dicatat dan dibuktikan serta dilaporkan sesuai kaidah akuntansi yang merupakan turunan dari Al-baqarah : 282.<sup>20</sup>

#### **e. Beban**

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dengan membentuk arus keluar/depresiasi asset dan menurunnya nilai net asset yang menjadi pastisipasi lainnya dalam operasional perusahaan.<sup>21</sup>

##### **1. Jenis-Jenis Beban**

Sebagai subjek dan objek hukum, dimana untuk mempertahankan kelangsungan hidup, masjid memiliki pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran dalam suatu kegiatan.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban lain-lain/tidak terduga, beban murni akrual, dan beban transfer.

Lazimnya, pengeluaran masjid mencakup beban pegawai, beban barang, beban jasa, dan beban pemeliharaan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 68

a. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang dan barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai yang bertugas secara terus menerus mengurus masjid selama periode akuntansi

b. Beban barang

Beban barang adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk membeli barang keperluan sehari-hari untuk kegiatan operasional masjid guna mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan beribadah di dalam masjid.

c. Beban jasa

Beban jasa adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan dalam bentuk jasa untuk kegiatan operasional masjid guna mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam masjid.

d. Beban pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk mempertahankan keutuhan asset yang dimiliki sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka mempertahankan eksistensi pelayanan keamanan dan kenyamanan beribadah di dalam masjid.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 85



## B. Kajian Terdahulu

No	Judul	Hasil
1.	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurus Syifa' Surakarta)	melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya praktek akuntansi yang digunakan di masjid Nurus Syifa' sangat sederhana namun para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggungjawab (akuntabilitas) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.
2.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan

		<p>keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.</p>
3.	<p>Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Implementasi Isak 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)</p>	<p>Organisasi keagamaan memiliki andil besar dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi masyarakat, salah satunya masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, serta penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten</p>

Kediri. Masjid Agung An-Nuur merupakan masjid yang menjadi central syiar islam di Kabupaten Kediri, serta berdiri dibawah naungan dan menerima aliran dana dari pemerintah kabupaten. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan interpretif serta melalui metode studi kasus (penelitian langsung). Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masjid belum mencapai akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Dalam penelitian, diketahui masjid tidak memiliki pedoman dalam membuat pelaporan keuangan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi (SOP/Standart Operation Prosedure), belum menyajikan informasi dengan lengkap, serta belum memiliki website resmi sebagai media infromasi/publikasi. Meskipun begitu, masjid telah melaksanakan tanggung jawab dalam memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan. Masjid tidak pernah menerima masukan maupun tuntutan jamaah atas akuntabilitas dan transparansi yang selama ini telah dilakukan. Terkait dengan laporan keuangan, pengurus masjid masih belum mengetahui dan memahami ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan entitas nonlaba, sehingga laporan keuangan masih sederhana. Maka demikian, masjid masih

		<p>harus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan serta menerapkan ISAK 35 sebagai bagian penunjang akuntabilitas dan transparansi masjid.</p>
4.	<p>Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Masjid (Penelitian Pada 36 Masjid Besar di Kota Bandung)</p>	<p>melalui pendekatan metode deskriptif asosiatif menyebutkan dalam skripsinya uji hipotesis penelitian, penulis melakukannya dengan uji t untuk masing-masing variable <math>x_1</math> dan <math>x_2</math>, dan <math>y</math>. Dari hasil uji hitung akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid <math>t</math> hitung (4,199) lebih besar dari <math>t</math> table (2,035), transparansi <math>t</math> hitung (4,818) lebih besar dari <math>t</math> table (2,035). Maka hasil uji hipotesis tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima (<math>H_0</math> ditolak, <math>H_a</math> diterima) artinya terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap manajemen keuangan masjid dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid.</p> <p>Untuk mencari besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid secara simultan penulis melakukannya dengan uji <math>f</math> dengan koefisien determinasi (<math>K_d</math>). Dari hasil uji <math>f</math> hitung <math>&gt; f</math> table yaitu (33,790) lebih besar dari <math>f</math> tabel (3,285). Hasil perhitungan tersebut bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dengan nilai 67,2% sedangkan sisanya 32,8% adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.</p>

5.	Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada 5 Masjid di Medan)	melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya akuntabilitas pada laporan keuangan masjid ini akan menjadi pertanggungjawaban masjid kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masjid. Penelitian ini menemukan persamaan dari pertanggungjawaban laporan keuangan masjid, namun terdapat beberapa perbedaan dalam hal penyajian laporan keuangan masjid.
6.	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Di Wonosobo (Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar Di Kemenag Kabupaten Wonosobo Tahun 2019)	Konsep ini secara secara spesifik menjelaskan bagaimana proses laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas masjid yang ada di kabupaten Wonosobo, sehingga dapat di jadikan informasi bagi masyarakat terkait tingkat transparansi dan akuntabel di Kabupaten Wonosobo.
7.	Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Lembaga Anaz Mahfuz dan Masjid Al-Huda)	melalui pendekatan metode kualitatif menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 ataupun PSAK 45 dalam laporan keuangannya. Bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Tetapi setelah melakukan rekontruksi laporan keuangan sederhana lebih cocok untuk diterapkan atau disesuaikan dengan PSAK 109 di banding dengan PSAK 45 karena

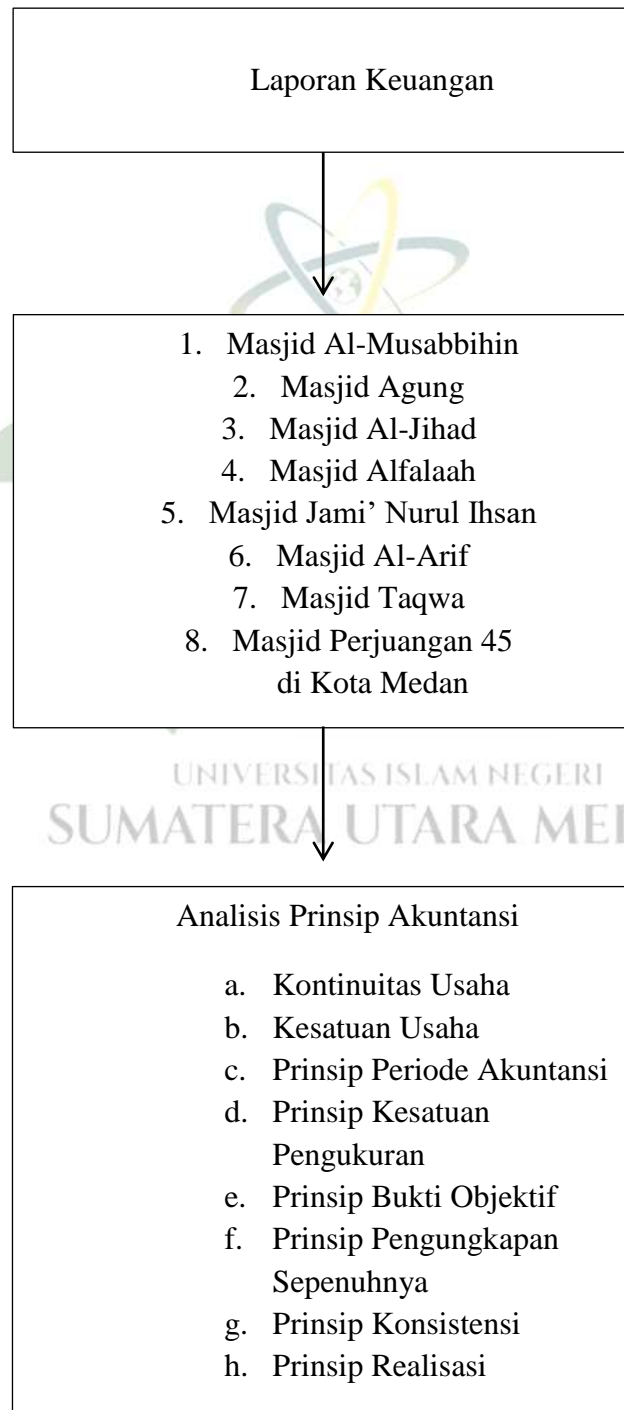
		akun-akun yang terdapat di laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun-akun PSAK 109.
8.	Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya	<p>Organisasi keagamaan merupakan organisasi nirlaba, karena organisasi ini didirikan tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Mengingat semakin berkembangnya umat Islam dan masjid di Indonesia, maka dana yang dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas dan biaya operasional masjid menjadi tidak sedikit jumlahnya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, sarana dan prasarana, serta pembangunan dan pembenahan masjid itu sendiri, sehingga sudah sepantasnya masjid sebagai organisasi nirlaba</p> <p>juga memperhatikan masalah pencatatan dan pelaporan keuangan.</p> <p>Akuntabilitas keuangan organisasi masjid bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai karakteristik khusus organisasi masjid.</p> <p>Penaksiran resiko dan penentuan aktivitas pengendalian akan menjadi kunci utama bagi pengembangan sebuah sistem pengendalian internal. Akuntabilitas</p>

	<p>keuangan organisasi nirlaba juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengolahan yang lain, yaitu sumber daya manusia, infrakstruktur, dan perangkat pengelolaan keuangan. Keseluruhan elemen ini harus dipahami dan dikembangkan secara sistematis, sebagai salah satu upaya mempertahankan keberlanjutan organisasi dan pada akhirnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dan peran masyarakat sipil di Indonesia.</p>
--	---

**Tabel 2. 1. Kajian Terdahulu**

### C. Kerangka Pemikiran

Analisis sistem informasi akuntansi masjid



Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran